

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kependudukan menjadi masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang terutama Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan yang tinggi. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India dan Amerika Serikat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2023 telah mencapai 278,8 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 1,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,7 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan kecepatan pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu tertentu. Jumlah penduduk yang tinggi bisa menguntungkan namun juga bisa menjadi beban dalam suatu proses pembangunan apabila kualitasnya kurang mumpuni. Penduduk juga bisa menjadi sumber daya yang paling penting bagi suatu negara dan sebagai faktor utama dalam pembangunan negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya jumlah penduduk yaitu dipengaruhi oleh faktor fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain (migrasi). Kelahiran dan migrasi masuk mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan kematian dan migrasi keluar mengakibatkan menurunnya jumlah penduduk (**Faqih, 2010**).

Tingkat kelahiran yang tinggi merupakan hal yang positif bagi negara dengan tingkat mortalitas yang tinggi, namun untuk negara berkembang hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan khususnya dalam hal ekonomi. Sebagian orang menganggap positif dengan adanya jumlah penduduk yang besar karena dapat menjadi subjek pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan adanya jumlah tenaga kerja yang banyak (**Eny Rochida, 2016**). Pertumbuhan penduduk apabila tidak disertai oleh peningkatan kapasitas ekonomi maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Dampak dari meningkatnya jumlah penduduk antara lain pengangguran, kriminalitas, dan dampak sosial lainnya. Seperti contohnya untuk tingkat pengangguran di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta jiwa per Agustus 2023. Walaupun angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dimana tingkat pengangguran berjumlah 8,42 juta jiwa, hal ini terbilang masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Maka dari itu perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) karena dengan adanya SDM yang berkualitas akan memacu pembangunan lebih baik lagi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk adalah fertilitas. Menurut **Mantra dalam Rakhmatullah (2015)** terdapat beberapa cara untuk mengendalikan tingkat fertilitas yang terbagi dalam faktor demografi dan non demografi. Faktor demografi yang terdiri dari komposisi umur, status perkawinan, umur kawin pertama, fekuditas, proporsi penduduk yang berstatus kawin. Faktor non demografi yang terdiri dari ekonomi

penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi, dan industrialisasi.

Provinsi Jawa Barat menunjukkan kondisi bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Tabel di bawah menjelaskan bahwa jumlah penduduk Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 48.037.827 jiwa. Pada tahun 2018 penduduk di provinsi naik menjadi Jawa Barat sebesar 48.683.861 jiwa. Hingga pada tahun 2021 jumlah penduduk Jawa Barat berdasarkan hasil sensus penduduk adalah 48.782.402 jiwa. Terakhir, pada tahun 2022 penduduk Jawa Barat kembali mengalami peningkatan sehingga berjumlah 49.405.810 jiwa. Maka dari itu, Provinsi Jawa Barat masih disebut sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	LPP (Persen)
2017	48.037.827	1,39
2018	48.683.861	1,49
2019	49.316.712	1,48
2020	49.935.858	1,11
2021	48.782.402	1,41
2022	49.405.810	1,33

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Sementara itu untuk laju pertumbuhan penduduk (LPP) Jawa Barat yaitu sebesar 1,39% pada tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 1,49% sedangkan tahun 2019 turun menjadi 1,48%. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2020 semakin menurun menjadi 1,11% dan puncaknya pada tahun 2022 LPP Jawa Barat sebesar 1,33% (**BPS**). Walaupun adanya program Keluarga

Berencana (KB), namun ternyata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat mengalami kondisi naik turun dan bahkan terbelang cukup tinggi. Begitu pula dengan jumlah penduduk di Jawa Barat juga mengalami fluktuasi. Begitu pula dengan jumlah kelahiran hidup di Provinsi Jawa Barat. Kelahiran hidup merupakan lahirnya seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya berada di dalam kandungan, yang mana bayi tersebut menunjukkan tanda-tanda hidup saat dilahirkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran, diantaranya laju pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah perempuan, dan penduduk wanita yang bekerja. Masing-masing variabelnya memiliki hubungan dengan tingkat kelahiran. Berikut adalah data jumlah kelahiran hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat di tahun 2018-2022.

Tabel 1.2
Jumlah Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Barat 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bogor	117350	118195	113552	109561	111012
Kabupaten Sukabumi	44461	NA	NA	45196	41508
Kabupaten Cianjur	44262	41126	NA	42225	38921
Kabupaten Bandung	67965	67767	66902	7388	66836
Kabupaten Garut	54697	NA	52256	60424	47207
Kabupaten Tasikmalaya	30591	30724	30357	29950	26877
Kabupaten Ciamis	19363	19146	NA	18438	15799
Kabupaten Kuningan	19825	19454	19315	18469	16076
Kabupaten Cirebon	47771	48414	47531	46341	3355
Kabupaten Majalengka	20640	20437	20967	19835	17353
Kabupaten Sumedang	19208	18813	19060	17881	16252
Kabupaten Indramayu	34707	34585	30054	28613	2484
Kabupaten Subang	30969	31918	33176	33340	21917
Kabupaten Purwakarta	19096	19273	17545	18082	16172
Kabupaten Karawang	43964	44850	42965	37657	37658
Kabupaten Bekasi	72867	79734	77386	76801	75146
Kabupaten Bandung Barat	29828	30337	30337	23679	28472
Kabupaten Pangandaran	6112	6074	6095	6020	5309

Kota Bogor	19669	20195	18742	17613	17554
Kota Sukabumi	5997	6076	6152	5771	5272
Kota Bandung	41001	41834	34366	38017	37338
Kota Cirebon	5652	5491	5163	5081	4804
Kota Bekasi	47313	49545	46077	44445	49284
Kota Depok	43227	43856	44480	41778	42747
Kota Cimahi	10767	10805	10361	10096	9609
Kota Tasikmalaya	12016	11710	11830	11520	10641
Kota Banjar	NA	3031	2951	2849	2696

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Dapat dilihat dari tabel 1.2 merupakan data kelahiran tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Menurut data tersebut, jumlah kelahiran setiap tahunnya mengalami kondisi kenaikan dan juga penurunan. Masih berpacu pada data di atas, angka kelahiran di Kabupaten Bogor memiliki angka yang tertinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya dimana pada tahun 2018 mencapai 118.195 jiwa. Sedangkan untuk angka terendah terjadi pada Kota Banjar yang mana pada tahun 2022 mencapai angka 2629 jiwa. Dapat kita lihat juga dari data di atas bahwa Kabupaten Cirebon mengalami penurunan angka kelahiran yang signifikan dari tahun 2021 sebesar 46.341 jiwa menjadi 3335 jiwa. Tingkat kelahiran merupakan indikator penting dalam demografi karena mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu wilayah.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2022 (Persen)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bogor	5,85	-1,76	3,55	5,25
Kabupaten Sukabumi	5,64	-0,91	3,74	5,12
Kabupaten Cianjur	5,67	-0,77	3,48	5,04
Kabupaten Bandung	6,36	-1,8	3,56	5,35
Kabupaten Garut	5,02	-1,26	3,58	5,08
Kabupaten Tasikmalaya	5,43	-0,98	3,43	4,7
Kabupaten Ciamis	5,38	-0,14	3,66	5,02
Kabupaten Kuningan	6,59	0,11	3,56	5,53

Kabupaten Cirebon	4,68	-1,08	2,47	4,09
Kabupaten Majalengka	7,77	0,89	4,75	6,63
Kabupaten Sumedang	6,33	-1,12	3,17	5,03
Kabupaten Indramayu	3,2	-1,58	0,58	2,88
Kabupaten Subang	4,61	-1,15	2,18	4,21
Kabupaten Purwakarta	4,37	-2,13	3,42	5,24
Kabupaten Karawang	4,21	-3,8	5,85	6,31
Kabupaten Bekasi	3,95	-3,39	3,62	5,3
Kabupaten Bandung Barat	5,05	-2,41	3,46	5,34
Kabupaten Pangandaran	5,94	-0,05	3,67	5,03
Kota Bogor	6,19	-0,41	3,76	5,65
Kota Sukabumi	5,53	-1,49	3,71	5,35
Kota Bandung	6,79	-2,28	3,76	5,41
Kota Cirebon	6,29	-0,98	3,05	5,1
Kota Bekasi	5,41	-2,58	3,22	4,96
Kota Depok	6,74	-1,92	3,76	5,24
Kota Cimahi	7,85	-2,26	4,19	5,92
Kota Tasikmalaya	5,97	-2,01	3,57	5,01
Kota Banjar	5,03	0,94	3,49	4,19

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel di atas terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia sehingga LPE melambat dan menjadi minus. Lalu pada tahun 2021, perekonomian di Jawa Barat kembali pulih sedikit demi sedikit sehingga LPE kembali positif dan naik hingga tahun 2022. Angka LPE tertinggi berada di Kabupaten Cimahi sebesar 7,85% di tahun 2019 sedangkan angka terendah terjadi pada Kabupaten Bekasi sebesar -3,39% di tahun 2020.

Salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas adalah tingkat pendidikan dan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Provinsi Jawa Barat maka dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah Perempuan (RLSP). Dan untuk data selengkapnya dapat dilihat dari tabel 1.4 di bawah ini.

Tabel 1.4
Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018 2022

Nama Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bogor	7,28	7,65	7,71	7,79	8
Kabupaten Sukabumi	6,56	6,69	6,81	6,84	6,85
Kabupaten Cianjur	6,48	6,49	6,71	6,72	6,73
Kabupaten Bandung	8,28	8,35	8,71	8,82	8,83
Kabupaten Garut	7,03	7,12	7,09	7,1	7,41
Kabupaten Tasikmalaya	6,86	7,05	7,04	7,33	7,58
Kabupaten Ciamis	7,31	7,51	7,52	7,63	7,84
Kabupaten Kuningan	7,08	7,1	7,28	7,54	7,62
Kabupaten Cirebon	6,29	6,36	6,63	6,66	6,97
Kabupaten Majalengka	6,45	6,54	6,73	6,88	7,08
Kabupaten Sumedang	7,89	8,04	8,33	8,34	8,45
Kabupaten Indramayu	5,27	5,28	5,53	5,77	6,12
Kabupaten Subang	6,26	6,27	6,53	6,54	6,82
Kabupaten Purwakarta	7,47	7,64	7,65	7,66	7,68
Kabupaten Karawang	6,73	7,03	6,96	6,97	7,22
Kabupaten Bekasi	8,34	8,35	8,62	8,82	9,07
Kabupaten Bandung Barat	7,65	7,81	7,82	7,83	7,85
Kabupaten Pangandaran	7,39	7,4	7,44	7,55	7,73
Kota Bogor	9,9	9,91	9,93	10,12	10,23
Kota Sukabumi	8,99	9,22	9,23	9,44	9,79
Kota Bandung	10,34	10,39	10,4	10,65	10,66
Kota Cirebon	9,31	9,32	9,33	9,58	9,84
Kota Bekasi	10,86	10,87	10,92	11,11	11,43
Kota Depok	10,39	10,42	10,7	10,84	11,15
Kota Cimahi	10,62	10,63	10,63	10,71	10,83
Kota Tasikmalaya	8,65	8,9	9	9,29	9,3
Kota Banjar	8,17	8,18	8,23	8,34	8,51

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Semakin lama perempuan semakin sadar akan pentingnya mengenyam bangku pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah perempuan (RLSP) yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah perempuan tertinggi terjadi pada Kota Bekasi mencapai 11,43 tahun yang artinya perempuan di Kota Bekasi mengenyam pendidikan hingga 11,43 tahun atau setara dengan kelas 12. Lalu untuk angka terendah ada pada Kabupaten Indramayu

dengan angka 5,27 tahun dimana rata-rata perempuan di Kabupaten Indramayu bersekolah hanya sampai tingkat sekolah dasar (SD). Berdasarkan data di atas juga, bisa kita lihat bahwa rata-rata lama sekolah perempuan di kota lebih tinggi dibandingkan perempuan di kabupaten. Perempuan di kota banyaknya sudah bersekolah hingga tingkat sekolah menengah atas (SMA). Tingkat pendidikan ini juga penting dan berpengaruh pada fertilitas, sehingga semakin lama bersekolah maka perempuan akan mempengaruhi keputusan seorang perempuan dalam melangsungkan pernikahan dan memiliki anak juga jumlah anak yang dilahirkan cenderung lebih sedikit.

Tabel 1.5
Penduduk Wanita Yang Bekerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022
(Jiwa)

Nama Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bogor	813338	943066	927599	940409	914592
Kabupaten Sukabumi	332550	355456	373757	420005	486551
Kabupaten Cianjur	271741	369937	417213	418043	448940
Kabupaten Bandung	557905	651088	602672	646985	642716
Kabupaten Garut	340013	383724	397880	422506	512923
Kabupaten Tasikmalaya	307866	331807	378199	360041	367631
Kabupaten Ciamis	227729	243193	279670	265173	259617
Kabupaten Kuningan	154183	166840	191017	193947	183989
Kabupaten Cirebon	330379	381314	380104	398125	399759
Kabupaten Majalengka	217319	243238	263683	263743	243289
Kabupaten Sumedang	183954	201252	255903	260266	226148
Kabupaten Indramayu	272397	320793	340663	356623	355359
Kabupaten Subang	250187	310426	304644	309382	319480
Kabupaten Purwakarta	145614	148393	136333	150097	165085
Kabupaten Karawang	369982	372519	386589	392092	402205
Kabupaten Bekasi	493126	590632	626635	735211	681533
Kabupaten Bandung Barat	228350	248237	225136	250036	268360
Kabupaten Pangandaran	106160	97212	103460	101796	118732

Kota Bogor	189217	189062	179229	191675	204343
Kota Sukabumi	47599	53391	47648	52179	56860
Kota Bandung	440747	495269	502942	509415	548580
Kota Cirebon	68073	56692	61499	62131	63727
Kota Bekasi	555726	567248	577036	583198	569755
Kota Depok	396019	439168	443280	460524	469232
Kota Cimahi	106218	109476	107861	108523	116038
Kota Tasikmalaya	106875	119779	132658	134490	126860
Kota Banjar	35382	37783	41457	39402	36008

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk wanita yang bekerja di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi. Seperti contohnya yang terjadi di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 terdapat 813.338 jiwa perempuan yang bekerja lalu jumlahnya naik turun dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2022 terdapat 914.592 jiwa perempuan yang bekerja. Dapat dikatakan bahwa perempuan yang bekerja cenderung mempunyai anak sedikit dan aktif menggunakan kontrasepsi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Ferry Hadiyanto (2017)** menjelaskan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang tinggi dan jumlah anggota rumah tangga mempengaruhi tingkat fertilitas di Jawa Barat secara positif. Lalu, variabel kepala rumah tangga yang bekerja, serta pengeluaran rumah tangga untuk kalangan pendapatan menengah ke atas memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat fertilitas. Selanjutnya, menurut hasil penelitian oleh **Rendi Arialdi, dkk (2016)** menunjukkan bahwa pendidikan dan pendapatan berpengaruh negatif dengan signifikan berbeda terhadap fertilitas sedangkan urbanisasi berpengaruh positif signifikan dimana hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian di beberapa negara Asia yang menunjukkan bahwa urbanisasi berpengaruh negatif

terhadap fertilitas. Penelitian lain yang dilakukan oleh **Syamsul** menyatakan bahwa adanya hubungan antara tingkat pendidikan perempuan dengan jumlah kelahiran. Kesempatan wanita untuk menempuh pendidikan yang tinggi cenderung menurunkan tingkat fertilitas. Sedangkan hubungan antara kesempatan kerja untuk perempuan dan tingkat kelahiran dengan indeks keamatan yang lemah karena tergantung di sektor mana perempuan tersebut bekerja.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Fertilitas di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah perempuan, dan penduduk wanita yang bekerja terhadap jumlah kelahiran di Jawa Barat tahun 2011-2022?
2. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah perempuan, dan penduduk wanita yang bekerja terhadap jumlah kelahiran di Jawa Barat tahun 2011-2022 secara parsial dan simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

3. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah kelahiran di Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan terhadap jumlah kelahiran di Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh penduduk wanita yang bekerja terhadap jumlah kelahiran di Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman khususnya bagi peneliti, juga sumbangan pemikiran bagi mahasiswa atau pihak yang hendak melakukan penelitian yang sama. Selain itu penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dengan adanya perbaikan pendapatan akan memberi dampak terhadap pertumbuhan penduduk atau tingkat kelahiran anak.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan melalui penelitian ini masyarakat bisa lebih memahami dan menerima norma keluarga kecil dan sejahtera sehingga norma tersebut bisatercapai.